



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Clarity in Transition
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja
KPKNL Lhokseumawe
2025

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe tahun anggaran 2025 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Sepanjang tahun 2025, KPKNL Lhokseumawe telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan searah dengan Peta Strategis KPKNL Lhokseumawe tahun 2025 yang diterjemahkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala KPKNL Lhokseumawe Tahun 2025 dengan terdiri dari 18 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dari hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Lhokseumawe telah mencapai 115,98%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif, yaitu *Stakeholder Perspective* sebesar 33,79%, *Customer Perspective* sebesar 22,94%, *Internal Process Perspective* sebesar 29,38%, dan *Learning & Growth Perspective* sebesar 29,88%.

Pencapaian tersebut adalah bentuk pelayanan KPKNL Lhokseumawe kepada *stakeholder* yang selama ini berkontribusi pada penerimaan negara yang berasal dari pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang. Hal ini tercermin dari hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan dengan nilai 99,60 dari skala 100,00.

LAPORAN KINERJA KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

Laporan Kinerja KPKNL Lhokseumawe Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dalam upaya pencapaian visi dan misi KPKNL Lhokseumawe. Akhirnya dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada, kami berharap laporan ini dapat berguna sehingga dapat dijadikan sebagai tolak ukur kinerja yang telah dicapai sekaligus indikator guna meningkatkan kinerja lebih baik di masa yang akan datang.

Lhokseumawe, 02 Februari 2026
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Novrizal



Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja KPKNL Lhokseumawe ini disusun sebagai bagian dari perwujudan prinsip akuntabilitas dan asas keterbukaan dalam praktik *good governance*. Laporan Kinerja ini juga berfungsi sebagai dokumentasi pencapaian pelaksanaan program/Rencana Kerja Tahun 2025, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Kanwil DJKN Aceh, dan diharapkan dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selama tahun 2025, terdapat 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kemenkeu *Three* KPKNL Lhokseumawe dan seluruh IKU telah memenuhi target dengan status capaian HIJAU. Nilai Kinerja Organisasi yang dicapai adalah sebesar 115,98%. Dalam upaya mewujudkan sasaran-sasaran ini KPKNL Lhokseumawe yang pada tahun 2025 mendapatkan alokasi dana DIPA sebesar Rp2.318.222.000,00 dan telah teralisasi sebesar Rp 2.138.520.876,00 atau 92,25%.

Berdasarkan pada Peta Strategi *Kemenkeu-Three* KPKNL Lhokseumawe tahun 2025, terdapat 8 Sasaran Strategis (SS) dengan 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan KPKNL Lhokseumawe yang penjabarannya dari masing-masing perspektif sebagai berikut:

1. *Stakeholder Perspective* dengan bobot IKU 30% tercapai sebesar 33,79%;
2. *Customer Persepective* dengan bobot IKU 20% tercapai sebesar 22,94%;
3. *Internal Process Perspective* dengan bobot IKU 25% tercapai 29,38%;
4. *Learning and Growth Perspective* dengan bobot IKU 25% tercapai 29,88%;



Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi.....	iv
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
1.2 Sumber Daya Manusia	4
1.2.1 Berdasarkan Golongan	4
1.2.2 Berdasarkan Gender	5
1.2.3 Berdasarkan Pendidikan	5
1.2.4 Berdasarkan Jabatan Fungsional.....	5
1.3 Sarana dan Prasarana	6
1.4 Wilayah Kerja	7
BAB II Rencana Kinerja	9
2.1 Rencana Strategis	9
2.2 Perjanjian Kinerja dan Risiko 2025 dan Penyusunan Kinerja 2026	12
2.3 Pengukuran Kinerja.....	16
Bab 3 Akuntabilitas Kinerja	19
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	19
3.2 Realisasi Anggaran dan Efisiensi Sumber Daya	60
Bab 4 Penutup.....	64



01.

Pendahuluan

- A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- B. Sumber Daya Manusia
- C. Sarana dan Prasarana
- D. Wilayah Kerja

BAB I

Pendahuluan

1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh.

Tugas KPKNL Lhokseumawe sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

Dalam melaksanakan tugas, KPKNL Lhokseumawe menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b. Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- h. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. pelaksanaan administrasi KPKNL.

LAPORAN KINERJA KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

Susunan organisasi KPKNL Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

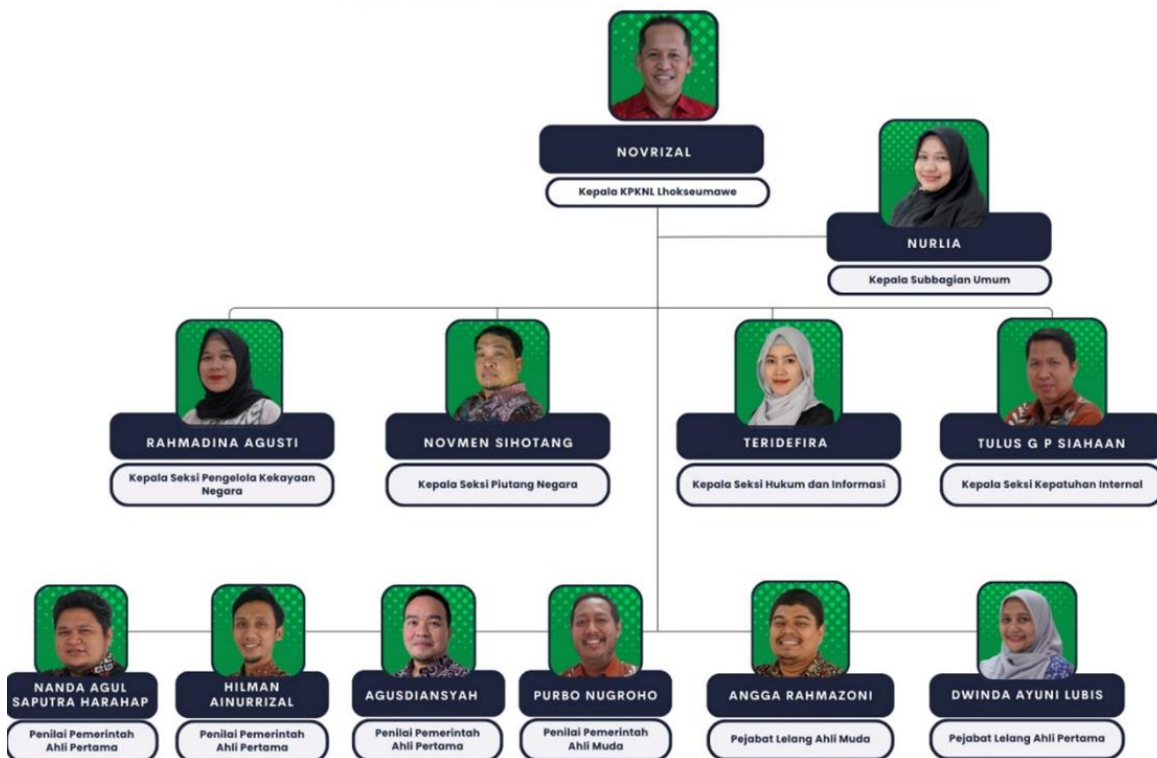
1. Subbagian Umum, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL.
2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/daftar barang milik negara/kekayaan negara.
3. Seksi Piutang Negara, mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.
4. Seksi Hukum dan Informasi, mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, Jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
5. Seksi Kepatuhan Internal, mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

LAPORAN KINERJA KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

6. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan, yang terdiri dari:
- Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah, mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang penilaian property dan/atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Jabatan Fungsional Pelelang, mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan lelang dalam lingkungan instansi pemerintah. Pelelang mempunyai tugas melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela.

Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe



Gambar 1 Struktur Organisasi KPKNL Lhokseumawe periode 31 Desember 2025

LAPORAN KINERJA KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

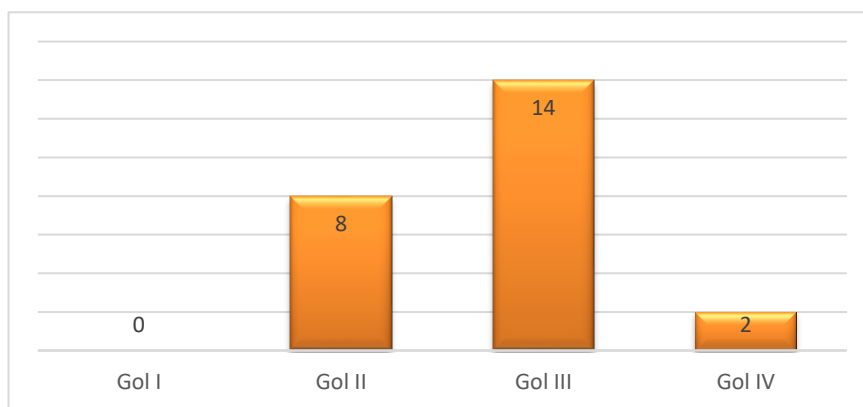
Penjelasan struktur organisasi KPKNL Lhokseumawe:

1. Kepala Kantor;
2. Kepala Subbagian Umum terdiri dengan 4 (empat) pelaksana, termasuk 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran;
3. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara dengan 3 (tiga) pelaksana;
4. Kepala Seksi Piutang Negara dengan 2 (dua) pelaksana;
5. Kepala Seksi Hukum dan Informasi dengan 3 (tiga) pelaksana, termasuk 1 (satu) orang Bendahara Penerimaan;
6. Kepala Seksi Kepatuhan Internal dengan 1 (satu) pelaksana;
7. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri 4 (empat) Penilai Pemerintah dan 2 (dua) Pelelang.

1.2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor penting dan tidak dapat dipisahkan dari sebuah organisasi. KPKNL Lhokseumawe didukung oleh 24 (dua puluh empat) orang pegawai yang bersinergi dalam melaksanakan pelayanan sesuai tugas dan fungsi. Berikut komposisi pegawai KPKNL Lhokseumawe yang dirinci berdasarkan golongan, jabatan struktural, Pendidikan, dan Jabatan Fungsional.

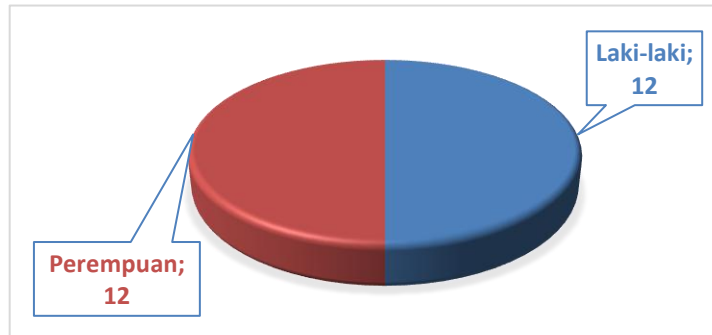
1.2.1 Berdasarkan Golongan



Gambar 2 Komposisi Pegawai KPKNL Lhokseumawe berdasarkan Golongan per 31 Desember 2025

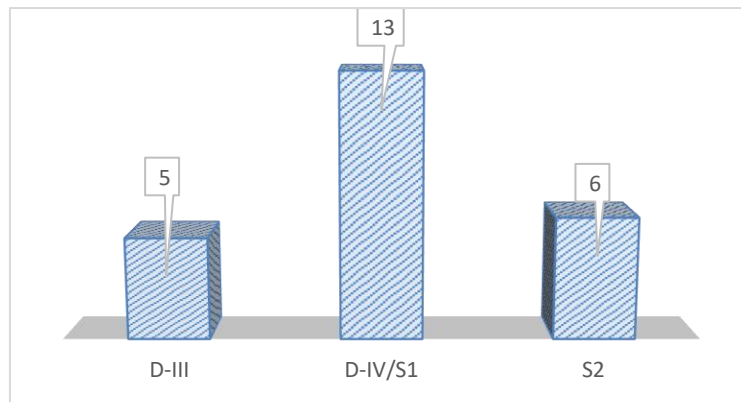
LAPORAN KINERJA KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

1.2.2 Berdasarkan Gender



Gambar 3 Komposisi Pegawai KPKNL Lhokseumawe berdasarkan Gender per 31 Desember 2025

1.2.3 Berdasarkan Pendidikan



Gambar 4 Komposisi Pegawai KPKNL Lhokseumawe berdasarkan Jenjang Pendidikan per 31 Desember 2025

1.2.4 Berdasarkan Jabatan Fungsional

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai KPKNL Lhokseumawe berdasarkan Jabatan Fungsional

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Pelelang/Pejabat Lelang	2
2	Penilai Pemerintah	4
3	Pranata Keuangan APBN Terampil	0
	Total	6

LAPORAN KINERJA KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

1.3 Sarana dan Prasarana

KPKNL Lhokseumawe beralamat di Jalan T Hamzah Bendahara, Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. KPKNL Lhokseumawe berdiri di atas tanah seluas 1.370 m² dan Gedung kantor 2 (dua) lantai dengan total luas bangunan mencapai 1.024 m². Prasarana kantor terdiri dari area pelayanan dan area bekerja yang dibagi menjadi beberapa ruangan sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Area Parkir; | 14. Ruang Pelelang; |
| 2. Area Pelayanan Terpadu; | 15. Mushalla; |
| 3. Area Kursi Tunggu Pelayanan; | 16. Area Wudhu; |
| 4. Ruang Bermain Anak; | 17. Dapur; |
| 5. Toilet; | 18. Ruang PJJ/Ujian; |
| 6. Ruang Konsultasi; | 19. Ruang Server; |
| 7. Ruang E-Auction; | 20. Area Open Space; |
| 8. Ruang Laktasi; | 21. Gudang Inventaris; |
| 9. Ruang Bendahara Penerimaan; | 22. Ruang Bendahara Pengeluaran; |
| 10. Ruang Rapat; | 23. Ruang Arsip BKPN; |
| 11. Ruang Sekretaris; | 24. Aula; |
| 12. Ruang Kepala Kantor; | 25. Ruang Subbagian Umum |
| 13. Gudang Arsip PKN, PN, Lelang; | 26. Gudang Arsip Umum. |

Sarana kantor yang mendukung langsung kegiatan pelayanan terdiri dari:

Tabel 1.2 Sarana KPKNL Lhokseumawe per 31 Desember 2025

No.	Sarana	Kondisi			Jumlah
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Kendaraan Dinas Operasional - Roda Empat	4	-	1	5
2	Kendaraan Dinas Jabatan – Roda Empat	1	-	-	1
3	Kendaraan Dinas Fungsional – Roda Empat	1	-	-	1
4	Kendaraan Dinas Operasional - Roda Dua	5	-	2	7
5	Laptop	21	8	2	31
6	Komputer	-	2	2	4

1.4 Wilayah Kerja

Wilayah kerja Kantor Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe mencakup daerah seluas 27.820 kilometer persegi yang meliputi 2 (dua) Kota dan 8 (delapan) Kabupaten. Adapun Kota dan Kabupaten tersebut sebagai berikut:

1. Kota Lhokseumawe;
2. Kota Langsa;
3. Kabupaten Bireuen;
4. Kabupaten Aceh Utara;
5. Kabupaten Aceh Timur;
6. Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Kabupaten Bener Meriah;
8. Kabuptaen Aceh Tengah;
9. Kabupaten Gayo Lues;
10. Kabupaten Aceh Tenggara.

Gambar 5 Wilayah Kerja KPKNL Lhokseumawe





02.

Rencana Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja dan Risiko Tahun 2025 dan Penyusunan Kinerja Tahun 2026
- C. Pengukuran Kinerja

BAB II

Rencana Kinerja

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi untuk mencapai visi dan tujuan yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu.

Sesuai rencana strategis DJKN tahun 2025-2029, visi DJKN yaitu: “Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan”.

Untuk merealisasikan visi yang ditetapkan maka KPKNL Lhokseumawe memiliki misi yang terdiri dari:

- a. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
- b. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
- c. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah kekayaan Negara;
- d. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
- e. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat;

Seluruh visi dan misi DJKN serta KPKNL Lhokseumawe senantiasa harus dijalankan dengan baik dan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu partisipasi akuntabilitas, *rule of law* dan transparansi, serta didukung oleh sistem dan sumber daya manusia yang andal dalam pengelolaan kekayaan negara.

Untuk mengimplementasikan misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Lhokseumawe untuk periode 2025-2029 yaitu:

LAPORAN KINERJA KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

- a. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
- b. Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara.
- c. Layanan lelang yang modern dan tepercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum.
- d. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

Untuk mengoptimalkan implementasi manajemen kinerja di lingkungan KPKNL Lhokseumawe dilakukan penyesuaian sistem manajemen kinerja dengan sistem manajemen lainnya, seperti sistem manajemen strategis, manajemen SDM dan organisasi, serta manajemen risiko. Bentuk penyesuaian sistem manajemen yang dilakukan antara lain:

- a. Penyesuaian manajemen kinerja dengan manajemen strategis
Salah satu acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja KPKNL Lhokseumawe yaitu dokumen Rencana Strategis DJKN tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025.
- b. Penyesuaian manajemen kinerja dengan manajemen SDM dan organisasi
Implementasi manajemen kinerja dimulai dari level Kementerian dan DJKN hingga ke seluruh pegawai. Sasaran strategis, IKU, dan target organisasi diturunkan hingga ke level individu melalui proses *cascading*. Hasil penilaian kinerja kemudian digunakan untuk penataan SDM.
- c. Penyesuaian manajemen kinerja dengan manajemen risiko
Pencapaian kinerja didukung dengan implementasi manajemen risiko untuk meminimalisasi adanya kejadian yang dapat mengganggu tercapainya sasaran organisasi.

LAPORAN KINERJA KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

Penyelarasan Rencana Strategis DJKN dan Perjanjian Kinerja KPKNL Lhokseumawe Tahun 2025 tergambar pada tabel berikut:

No	Rencana Strategis DJKN 2025-2029		Standar Nasional	Perjanjian Kinerja KPKNL Lhokseumawe 2025	
	Indikator Kinerja	Target		Indikator kinerja	Target
1	Indeks Integritas	100	-	Indeks integritas	100
2	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100	-	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%
3	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100	-	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
4	Persentase pencapaian hasil lelang (pokok lelang)	100	-	Persentase realisasi pokok lelang	100%
5	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100	-	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%
6	Indeks kepuasan penggunaan layanan	4,20 (skala 5)	-	Indeks kepuasan penggunaan layanan	77 (skala 100)
7	-	-	-	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
8	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100	-	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
9	-	-	-	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
10	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100	-	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
11	Tingkat kualitas layanan penilaian	70	-	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
12	Persentase produktivitas Lelang	80	-	Persentase produktivitas lelang	80%
13	-	-	-	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
14	-	-	-	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100

LAPORAN KINERJA KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

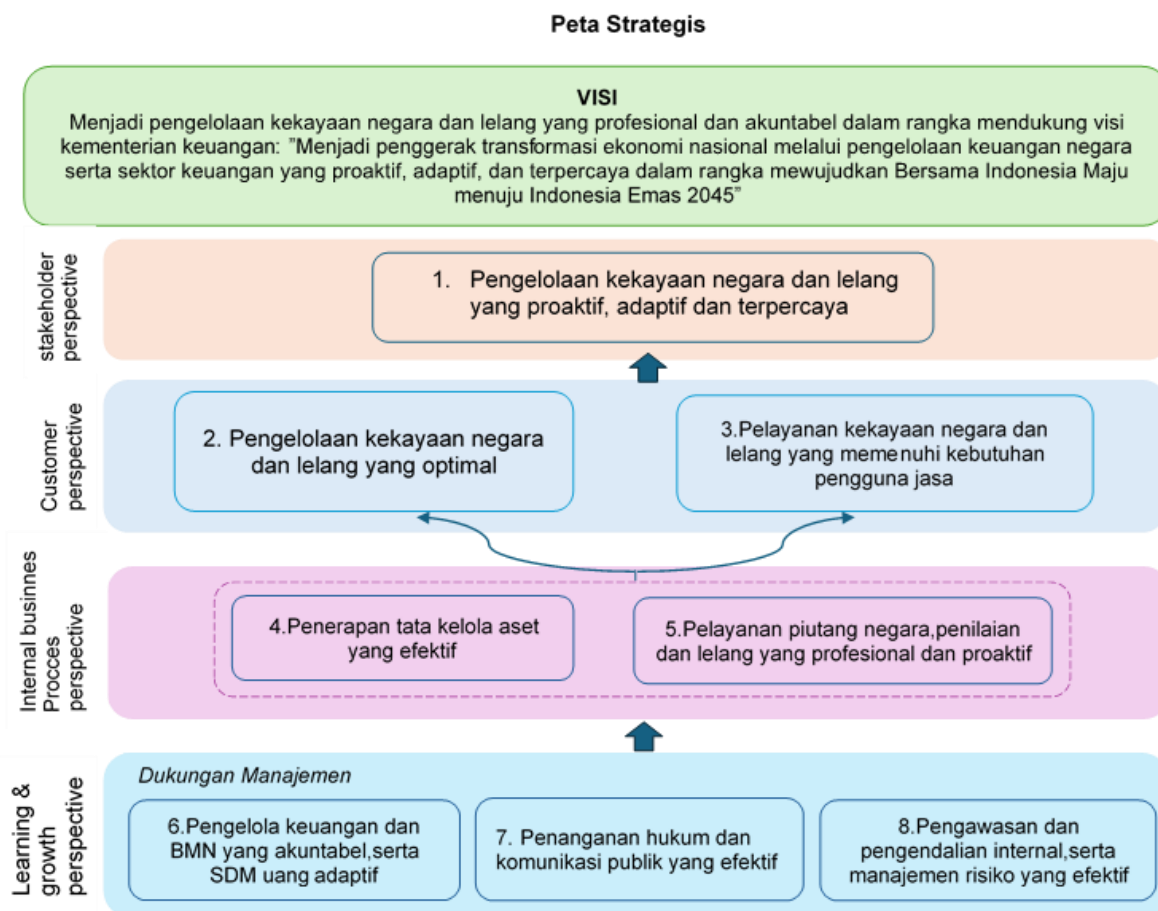
15	-	-	-	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
16	-	-	-	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
17	-	-	-	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
18	-	-	-	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80

2.2 Perjanjian Kinerja dan Risiko Tahun 2025 dan Penyusunan Kinerja Tahun 2026

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Lhokseumawe harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL Lhokseumawe. Sasaran strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategis organisasi.

LAPORAN KINERJA KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2025



Gambar 6 Peta Strategis KPKNL Lhokseumawe Tahun 2025

Peta Strategi Kemenkeu *Three* KPKNL Lhokseumawe Tahun 2025 tersebut memuat 8 Sasaran Strategis dan 18 Indikator Kinerja Utama. Rincian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja KPKNL Lhokseumawe Tahun 2025

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tahun 2025	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP Indeks Integritas	100
		1b-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100% (Rp11,3 M)

LAPORAN KINERJA KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tahun 2025	Target
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100% (Rp50 M)
		2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp100 Jt)
3	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-N Indeks kepuasan pengguna layanan	77
		3b-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80

LAPORAN KINERJA KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

Penyusunan Perjanjian Kinerja KPKNL Lhokseumawe Tahun 2026

Proses pembahasan *refinement* Perjanjian Kinerja dilakukan secara paralel dengan *refinement* Piagam Manajemen Risiko. Pembahasan *refinement* Perjanjian Kinerja KPKNL Lhokseumawe dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan seluruh pegawai, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan administrator. Hal ini menunjukkan tingginya komitmen tiap level dalam proses penyusunan IKU dan target IKU yang berkualitas.

Berdasarkan hasil pembahasan, telah ditetapkan Peta Strategis KPKNL Lhokseumawe tahun 2026 dengan jumlah sasaran strategis mencapai 8 sasaran strategis dan IKU yang diidentifikasi sebanyak 19 IKU. Selanjutnya, keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU tahun 2026 dapat disajikan dalam tabel berikut:

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tahun 2026	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	1a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan	100
		1b-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100% (Rp11,1 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	2a-CP Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100%
		2b-N Tingkat efektivitas pembinaan	80%
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	3a-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp500 jt)
		3b-CP Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp29M)
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		4b-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4c-CP Persentase evaluasi kinerja BMN	100%

LAPORAN KINERJA KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tahun 2026	Target
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	80%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	85%
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	6a-CP Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
		6b-N Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6c-N Indeks pengelolaan kearsipan	100
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP Indeks efektivitas komunikasi publik	80
		7b-CP Indeks penanganan permasalahan hukum	80
8	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks Integritas Organisasi	100
		8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83

2.3 Pengukuran Kinerja

Pengelolaan dan pengukuran kinerja organisasi dan kinerja pegawai KPKNL Lhokseumawe Tahun 2025 berpedoman pada Keputusan Menteri keuangan Nomor 300/KMK,01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengukuran capaian kinerja (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Polarisasi perhitungan IKU dapat berupa *maximize*, *minimize*, maupun *stabilize*;

LAPORAN KINERJA KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

3. Status capaian IKU ditunjukkan dengan keterangan warna hijau (tercapai), kuning (hampir tercapai), dan merah (tidak tercapai);
4. IKU yang telah ditetapkan, akan diupayakan secara optimal dengan realisasi pencapaian yang memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka capaian IKU tersebut dapat dikonversi menjadi 120% dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
 - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.



03.

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisas Anggaran dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

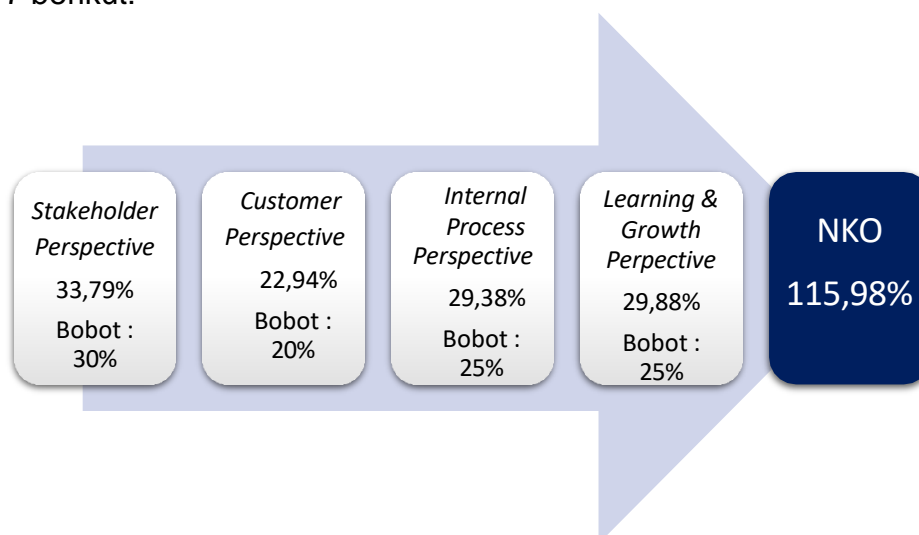
BAB III

Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja KPKNL Lhokseumawe sesuai dengan konsep *Balance Scorecard* (BSC) dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Lhokseumawe adalah sebesar 115,98%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif yang ditunjukkan pada Gambar 7 berikut:



Gambar 7 Capaian Kinerja Tiap Perspektif dan Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Lhokseumawe sampai dengan 31 Desember 2025

Selama tahun 2025, dari 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kemenkeu *Three* KPKNL Lhokseumawe, dan seluruh IKU telah memenuhi target dengan status capaian HIJAU. Berikut rincian capaian kinerja KPKNL Lhokseumawe tahun 2025:

LAPORAN KINERJA KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

Tabel 3.1 Capaian Kinerja KPKNL Lhokseumawe Tahun 2025

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Indeks Capaian IKU	Indeks Max. 120
Stakeholder Perspective (30%)						33,79
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya					112,65
1a-CP	Indeks Integritas	P/M	100,00	105,32	105,32	105,32
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100,00%	134,36%	134,36	120,00
Customer Perspective (20%)						22,94
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal					109,39
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	P/L	100,00%	102,01%	102,01	102,01
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/L	100,00%	108,96%	108,96	108,96
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	P/M	100,00%	121,01%	121,01	120,00
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa					120,00
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	P/M	77,00	95,49	124,01	120,00
3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	74,00	99,85	134,93	120,00
Internal Process Perspective (25%)						29,38
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif					115,00
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	P/M	100,00%	129,59%	129,59	120,00
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	P/M	100,00%	110,00%	110,00	110,00
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif					120,00
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	P/M	100%	122,92%	122,92	120,00
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	P/M	70%	106,02%	151,46	120,00
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	80,00%	133,67%	167,09	120,00
Learning and Growth Perspective (25%)						29,88
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif					120,00

LAPORAN KINERJA KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Indeks Capaian IKU	Indeks Max. 120
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	P/M	100,00	120,00	120,00	120,00
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	P/M	100,00	120,00	120,00	120,00
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	80,00%	98,00%	122,50	120,00
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif					119,61
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	P/M	100,00	119,22	119,22	119,22
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	P/M	80,00	112,50	140,63	120,00
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif					118,89
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	P/M	80,00	95,11	118,89	118,89
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)						115,98

Dari capaian kinerja terhadap 18 Indikator Kinerja Kemenkeu *Three* tahun 2025 tersebut, KPKNL Lhokseumawe melakukan analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu *Three*. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara target awal tahun, target *adendum* dan realisasi kinerja tahun 2025. Selanjutnya, berikut kami sajikan analisis dan evaluasi atas pencapaian target setiap IKU dalam Kemenkeu *Three* KPKNL Lhokseumawe Tahun 2025.

1. SASARAN STRATEGIS: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Lhokseumawe mengidentifikasi 2 IKU. Uraian mengenai kedua IKU adalah sebagai berikut.

1.1 Indeks Integritas

1) Deskripsi Kinerja

Indeks integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung

LAPORAN KINERJA KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Tujuan IKU ini bertujuan untuk memastikan peningkatan budaya integritas di seluruh organisasi Kementerian Keuangan yang dinilai menggunakan Survei Penilaian Integritas.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Po/KP
Target						100	100	Max/ TLK
Realisasi						105,32	105,32	
Capaian						105,32%	105,32%	

Hal-hal yang menjadi isu utama dalam pencapaian IKU Indeks Integritas hasil survei yang dilakukan oleh KPK berupa nilai per unit Eselon I, sehingga unit kerja tidak memperoleh nilai dan hasil survei secara rinci. Akibatnya, tindak lanjut penguatan integritas pada unit tidak dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena terdapat beberapa tindakan serta alternatif solusi yang dilakukan, antara lain:

- Pimpinan unit telah menjadi *role model* bagi pegawai.
- Program *know your employee* telah berjalan dengan baik.
- Pemberian *reward and punishment* telah diterapkan secara optimal dalam penegakan integritas.
- Implementasi ZI WBK/WBBM.

Kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu ketidakseragaman pemahaman para pengguna layanan (responden) akan pilar-pilar integritas dan nilai anti korupsi, serta perlunya peningkatan kompetensi dan pemahaman terkait layanan DJKN oleh pegawai.

LAPORAN KINERJA KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

Sejalan dengan ketercapaian IKU, telah dilaksanakan kegiatan *extra effort* untuk mendukung IKU berupa:

- a. Peningkatan peran lini pertama dan lini kedua pada setiap tahapan kerangka kerja integritas (pencegahan, deteksi, respon, monitoring dan evaluasi).
- b. Pimpinan memberikan keteladanan dalam pelayanan, dengan memberikan pelayanan prima namun tidak berlebihan.
- c. Peningkatan *awareness* internal pegawai dan eksternal pengguna layanan melalui diseminasi penguatan integritas.

Mitigasi risiko yang telah dilaksanakan untuk mencapai IKU antara lain melalui peningkatan sosialisasi dan diseminasi pembangunan integritas di lingkungan internal dan eksternal.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun mendatang adalah:

- a. Identifikasi, pemetaan, dan pemantauan periodik titik rawan gratifikasi.
- b. Peningkatan pengetahuan dan keseragaman pemahaman para pengguna layanan dengan melaksanakan sosialisasi, diseminasi dan pembangunan integritas di lingkungan internal maupun eksternal.

Perbandingan realisasi kinerja KPKNL Lhokseumawe dengan Rencana Strategis DJKN dan Standar Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Target			% Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Standar Nasional	
2025	100	100	-	105,32%

Realisasi kinerja IKU Indeks Integritas Organisasi tersebut telah memenuhi harapan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis DJKN Tahun 2025-2029. Adapun realisasi IKU ini memiliki nilai yang sama dengan nilai realisasi nasional sebesar 105,32.

1.2 Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

1) Deskripsi Kinerja

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

- PNBPN BMN

PNBPN dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan penerimaan negara dari kegiatan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan semua barang yang diperoleh atau diproses atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau perolehan lain yang sah yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara.

Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan PNBPN sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara.

- PNBPN Piutang Negara (PNBPN PN)

PNBPN yang berasal dari pengurusan Piutang Negara (PN) merupakan nilai pengurusan PN berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.

- PNBPN Lelang

PNBPN yang berasal dari proses lelang merupakan nilai hasil pelayanan lelang

LAPORAN KINERJA KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa:

- a. bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian;
- b. bea lelang batal atas permintaan penjual;
- c. biaya permohonan lelang;
- d. uang jaminan pembeli wanprestasi;
- e. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan tepercaya							
	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Po/ KP
Target (Rp)	1.240.400.000 (10,89%)	3.519.700.000 (30,89%)	3.519.700.000 (30,89%)	6.837.900.000 (60%)	6.837.900.000 (60%)	11.395.000.000 (100%)	11.395.000.000 (100%)	Max/ TLK
Realisasi (Rp)	1.300.093.410	5.535.717.007	5.535.717.007	8.357.768.850	8.357.768.850	15.310.088.053	15.310.088.053	
Capaian (R/T)	104,81%	157,28%	157,28%	122,23%	122,23%	134,36%	134,36%	

Capaian IKU tersebut berstatus HIJAU atau telah mencapai target. Rincian detail capaian per kelompok PNBPN sebagai berikut:

- Realisasi PNBPN Aset sampai dengan Triwulan IV 2025 sebesar Rp13.626.790.925,00 sudah melebihi target yang ditentukan sebesar Rp9.389.000.000,00 (capaian 145,14%);
- Realisasi PNBPN Piutang Negara sampai dengan Triwulan IV 2025 sebesar Rp59.890.984,00 sudah melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar Rp6.000.000,00 (capaian 998,2%);
- Realisasi PNBPN Lelang sampai dengan Triwulan IV 2025 sebesar Rp1.623.406.144,00 masih di bawah target yang ditentukan sebesar Rp2.000.000.000,00 (capaian 81,17%).

LAPORAN KINERJA KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

Realisasi IKU secara total telah melebihi target yang ditetapkan, namun capaian PNBP Lelang masih di bawah target tahun 2025. Secara nominal, capaian PNBP Lelang tahun 2025 (Rp1.623.406.144,00 dari target Rp2.000.000.000,00) mengalami penurunan dibandingkan capaian lelang tahun 2024 (Rp1.726.612.491,00 dari target Rp3.600.000.000,00). Namun secara persentase, ketercapaian PNBP Lelang tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan realisasi tahun 2024 yang tercapai sebesar 47,96%.

IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena terdapat beberapa tindakan serta alternatif solusi yang dilakukan, antara lain:

- a. Melakukan koordinasi aktif dengan penyerah piutang guna optimalisasi pengurusan dan penyelesaian piutang negara serta pendekatan persuasif kepada debitur;
- b. Telah dilaksanakan monitoring dan pengawasan rutin terkait tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN;
- c. Telah dilaksanakan rapat monitoring potensi target dan capaian lelang, khususnya dari perbankan. Selain itu, dilakukan pula koordinasi aktif penggalian potensi lelang, baik berupa BMN, BMD, dan perbankan.

Namun, masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- a. Outstanding BKPN aktif mayoritas tidak didukung dengan barang jaminan yang memadai. Selain itu, terdapat pula berkas piutang BLBI dengan jangka waktu cukup lama (> 20 tahun);
- b. Terdapat beberapa pembatalan lelang akibat bencana Hidrometeorologi di Aceh pada akhir tahun 2025.

Sejalan dengan ketercapaian IKU, telah dilaksanakan kegiatan *extra effort* untuk mendukung IKU berupa:

- a. Koordinasi dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Langsa untuk segera menindaklanjuti persetujuan pemindahtanganan barang tegahan.
- b. Penagihan aktif kepada debitur melalui pemanggilan secara kedinasan, penyampaian salinan Surat Paksa, dan pelaksanaan sita barang jaminan.

LAPORAN KINERJA KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

Penagihan dilaksanakan dengan pendekatan persuasif namun tegas.

- c. MoU antara KPKNL Lhokseumawe dengan Bank BSI untuk penyediaan *virtual account* pelunasan piutang negara yang memudahkan debitur melakukan pembayaran, serta mengurangi *human error* dalam pencatatan.
- d. Monitoring aktif dan penggalian potensi lelang pada satuan kerja/lembaga dan perbankan.

Mitigasi risiko yang telah dilaksanakan untuk mencapai IKU antara lain:

- a. Melakukan pemanggilan/penagihan kepada debitur.
- b. Melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN oleh satuan kerja.
- c. Melakukan pengamanan aset melalui pemasangan papan nama aset kelolaan eks PT PPA/BPPN.
- d. Monitoring dan evaluasi periodik atas potensi target dan capaian lelang.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun mendatang adalah:

- a. Pemetaan terhadap aset BMN yang berpotensi untuk dimanfaatkan.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja guna penggalian potensi pemanfaatan dan pemindahtanganan aset.
- c. Melakukan koordinasi dengan penyerah piutang terkait penagihan dan pemeriksaan debitur potensial.
- d. Melanjutkan pengurusan piutang negara ke tahap berikutnya.
- e. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja, pemerintah daerah, perbankan, kejaksaan maupun pelaku UMKM serta melakukan penggalian potensi lelang baik yang berasal dari BMN, BMD, perbankan, barang rampasan maupun lelang UMKM.

2. SASARAN STRATEGIS: Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Lhokseumawe mengidentifikasi tiga IKU. Uraian mengenai ketiga IKU adalah sebagai berikut:

2.1 Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara

1) Deskripsi Kinerja

Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara bertujuan menindaklanjuti hasil Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang dilakukan sejak tahun 2020 s.d. 2024 yang menunjukkan hasil belum optimal. Kegiatan optimalisasi pengelolaan BMN tahun 2025 dilaksanakan dengan berbagai upaya perbaikan, penyempurnaan, penyederhanaan dan kemudahan berbagai proses bisnis melalui optimalisasi IT.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
Lhokseumawe	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	600%	110,98%	110,98%	91,78%	91,78%	102,01%	102,01%	
Capaian	1200%	184,96%	184,96%	114,72%	114,72%	102,01%	102,01%	

Capaian IKU tersebut berstatus HIJAU atau telah mencapai target. Perhitungan IKU terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- a. Tingkat optimalisasi Pengelolaan BMN, dengan bobot 80%; dan
- b. Realisasi NUP yang selesai diukur, dengan bobot 20%.

Hal-hal yang menjadi isu utama dalam pencapaian IKU ini antara lain ketidaktersediaan anggaran khusus untuk kegiatan pengukuran tingkat optimalisasi BMN, namun perlu upaya ke lapangan untuk melakukan identifikasi NUP target dan pengukuran BMN objek optimalisasi.

IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena terdapat beberapa tindakan serta alternatif solusi yang dilakukan, antara lain:

- a. Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan satuan kerja terkait rencana kerja dan pelaksanaan pengukuran BMN.
- b. Komitmen bersama satuan kerja target untuk penyampaian formulir pendataan BMN dan KPKNL dalam menghitung tingkat kesesuaian optimalisasi.

LAPORAN KINERJA KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

Namun, masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu data BMN beberapa satuan kerja belum ditatausahakan dengan baik dan tidak diperbaharui secara berkala, akibatnya terdapat beberapa perbedaan data di pencatatan dengan data fisik.

Sejalan dengan ketercapaian IKU, telah dilaksanakan kegiatan *extra effort* untuk mendukung IKU berupa:

- a. Koordinasi dengan Kanwil DJKN Aceh dalam mengidentifikasi objek target optimalisasi potensial berdasarkan *database* SBSK 3 (tiga) tahun terakhir.
- b. Melakukan verifikasi formulir secara langsung ke lapangan untuk seluruh target optimalisasi, sehingga pada awal tahun sudah terkumpul formulir pendataan yang melebihi target *trajectory*.

Mitigasi risiko yang telah dilaksanakan untuk mencapai IKU antara lain:

- a. Melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN oleh satuan kerja.
- b. Monitoring dan evaluasi periodik atas progres pengukuran dan perhitungan tingkat kesesuaian optimalisasi BMN.
- c. Penyampaian usulan perubahan target NUP optimalisasi kepada Kanwil DJKN Aceh terhadap BMN potensial.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun mendatang antara lain menyiapkan rencana kerja detil sesuai dengan *trajectory* yang disetujui bersama Kanwil DJKN Aceh, pengusulan ketersediaan sumber dana khusus kegiatan optimalisasi sehingga pelaksanaan pengukuran ke lapangan berjalan lebih maksimal, serta meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja target optimalisasi.

2.2 Persentase Realisasi Pokok Lelang

1) Deskripsi Kinerja

Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

LAPORAN KINERJA KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, dan Pegadaian dalam periode tertentu.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseu- mawe	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	PoI/K P
Target	7.500.000.000	17.500.000.000	17.500.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	Max / TLK
Realisasi	9.230.789.800	23.042.175.416	23.042.175.416	39.691.212.421	39.691.212.421	54.479.966.997	54.479.966.997	
PL I	6.934.013.000	18.928.024.616	18.928.024.616	31.827.322.721	31.827.322.721	43.610.268.797	43.610.268.797	
Pegadaian	2.296.776.800	4.114.150.800	4.114.150.800	7.863.889.700	7.863.889.700	10.869.698.200	10.869.698.200	
Capaian	123,08%	131,67%	131,67%	132,30%	132,30%	108,96%	108,96%	

Capaian IKU tersebut berstatus HIJAU atau telah mencapai target. Realisasi pokok lelang berasal dari pelaksanaan lelang laku yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas I (KPKNL) dan lelang Pegadaian.

Secara nominal, realisasi pokok lelang tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan realisasi tahun 2024 (sebesar Rp51.463.929.548,00)

Hal-hal yang menjadi isu utama dalam pencapaian IKU ini adalah implementasi Lelang V2 (*reengineering* portal lelang.go.id) pada Januari 2025.

IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena terdapat beberapa tindakan serta alternatif solusi yang dilakukan, antara lain:

- a. Monitoring periodik potensi target dan capaian lelang, khususnya dari perbankan.
- b. Koordinasi aktif penggalian potensi lelang, baik berupa BMN, BMD, dan perbankan.

Namun, masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

- a. Terdapat berbagai penyesuaian penggunaan Lelang V2 baik dari sisi KPKNL selaku penyelenggara lelang maupun dari sisi peserta lelang.
- b. Terdapat beberapa pembatalan lelang akibat bencana Hidrometeorologi di Aceh pada akhir tahun 2025.

Sejalan dengan ketercapaian IKU, telah dilaksanakan kegiatan *extra effort* untuk mendukung IKU berupa pelaksanaan rangkaian lelang (non eksekusi sukarela/UMKM dan eksekusi Hak Tanggungan) dalam rangka peringatan hari lelang maupun Hari Oeang.

Mitigasi risiko yang telah dilaksanakan untuk mencapai IKU antara lain:

- a. Monitoring periodik potensi target dan capaian lelang, khususnya dari perbankan.
- b. Koordinasi aktif penggalian potensi lelang, baik berupa BMN, BMD, dan perbankan.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun mendatang antara lain menyiapkan rencana kerja lelang sesuai dengan *trajectory* target lelang, penggalian potensi lelang secara aktif, serta meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja, pemerintah daerah, Kejaksaan, serta perbankan.

2.3 Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara

1) Deskripsi Kinerja

Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara menggambarkan efektivitas kinerja PUPN dalam melakukan pengurusan piutang macet yang diserahkan oleh K/L/Pemda/BUN maupun pengurusan piutang macet yang diserahkan oleh badan/lembaga khusus/badan hukum publik berdasarkan PP 28/2022 jls. PMK 52/2024 yang ditandai dengan adanya penurunan nilai saldo piutang macet yang diurus PUPN. Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

- PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan

LAPORAN KINERJA KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);

- Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) termasuk koreksi karena kesalahan pencatatan;
- PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- Koreksi karena kekeliruan pencatatan dari Penyerah Piutang atau KPKNL.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	Persentase realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target (Rp)	25.000.000	50.000.000	50.000.000	75.000.000	75.000.000	1.868.146.000	1.868.146.000	Max /TLK
Realisasi (Rp)	1.464.147.195	1.746.892.624	1.746.892.624	1.868.145.391	1.868.145.391	2.260.735.661	2.260.735.661	
Capaian	5856,59%	3493,79%	3493,79%	2490,86%	2490,86%	121,01%	121,01%	

Isu utama dalam pencapaian IKU ini adalah adanya adendum target *raw data* IKU. Pada awal tahun 2025, target penurunan nilai saldo piutang negara ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00 namun dengan *extra effort* yang dilakukan KPKNL sepanjang tahun 2025, target tersebut telah terpenuhi di pertengahan tahun 2025, sehingga dilakukan adendum perubahan target *raw data* menjadi Rp1.868.146.000,00. Capaian IKU tersebut berstatus HIJAU atau telah mencapai target, dengan nilai realisasi akhir tahun sebesar Rp2.260.735.661,58 atau 102,01% dari target adendum.

IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena terdapat beberapa tindakan serta alternatif solusi yang dilakukan, antara lain:

- a. Koordinasi intensif dengan penyerah piutang serta perangkat pemerintah setempat, sehingga diperoleh informasi yang akurat mengenai kondisi dan kemampuan penanggung utang.
- b. Pendekatan persuasif kepada debitur dan/atau penanggung utang.

LAPORAN KINERJA KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

Namun, masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu keberadaan debitur dan barang jaminan tidak diketahui, debitur yang sebelumnya rutin membayar angsuran tidak lagi melakukan pembayaran, besaran angsuran tidak sesuai nilai kewajiban sehingga memperpanjang jangka waktu pelunasan, serta debitur atau ahli waris yang berjanji membayar namun tidak merealisasikan pembayaran.

Sejalan dengan ketercapaian IKU, telah dilaksanakan kegiatan *extra effort* untuk mendukung IKU berupa koordinasi intens dengan satuan kerja/lembaga penyerah piutang (Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kehutanan, dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir-KUKM) dan Badan Hukum Publik (BPJS Ketenagakerjaan), penagihan langsung serta penelitian dan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui keberadaan, domisili, dan kemampuan usaha debitur/penanggung utang.

Mitigasi risiko yang telah dilaksanakan untuk mencapai IKU antara lain:

- a. Setiap kegiatan lapangan dilakukan dengan koordinasi dan pendampingan Penyerah Piutang serta instansi setempat guna meminimalkan risiko dan hambatan pelaksanaan.
- b. Mendorong keaktifan pegawai dalam memanfaatkan seluruh potensi Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN), meskipun dalam kondisi keterbatasan data dan ketiadaan barang jaminan.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun mendatang antara lain melakukan penagihan langsung kepada Debitur atau Penanggung yang berpotensi untuk ditagih, melanjutkan kerja sama dengan Penyerah Piutang, serta melakukan penelitian dan pemeriksaan lapangan terhadap debitur atau penanggung utang dengan sisa nilai utang baik di bawah maupun di atas Rp500.000.000,00.

3. SASARAN STRATEGIS: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Lhokseumawe mengidentifikasi dua IKU. Uraian mengenai kedua IKU adalah sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

1) Deskripsi Kinerja

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna atas layanan yang diberikan. IKU ini mengukur survei kepuasan pengguna layanan DJKN dengan berpedoman pada PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pelaksanaan survei dikoordinasikan oleh Seksi kepatuhan Internal. Hasil survei kepuasan pengguna layanan diukur dengan indeksasi sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1) Persyaratan | 6) Kompetensi Pelaksana |
| 2) Sistem, Mekanisme, Prosedur | 7) Perilaku Pelaksana |
| 3) Waktu Penyelesaian | 8) Sarana Prasarana |
| 4) Biaya/Tarif | 9) Sarana Pengaduan |
| 5) Produk Layanan | |

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya					
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	77	77	77	77	77	Max/ TLK
Realisasi	84,96	91,48	94,12	95,49	95,49	
Capaian	110,34%	118,81%	120,00%	120,00%	120,00%	

Hal-hal yang menjadi isu utama dalam pencapaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan adalah perangkat dan hasil survei dilakukan secara terpusat oleh Itjen Kemenkeu, sehingga unit kerja tidak memperoleh hasil dan catatan survei secara rinci. Akibatnya, tindak lanjut perbaikan atas catatan yang disampaikan

LAPORAN KINERJA KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

pengguna layanan pada unit tidak dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena terdapat beberapa tindakan serta alternatif solusi yang dilakukan, antara lain:

- a. Sinergi internal KPKNL untuk pelayanan yang lebih optimal.
- b. Monitoring, evaluasi, serta menindaklanjuti monev hasil survei kepuasan pengguna layanan.

Kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu penyampaian form atau tautan survei yang kurang masif menyebabkan jumlah responden yang diperoleh belum maksimal jika dibandingkan dengan satuan kerja/ masyarakat penerima layanan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU, telah dilaksanakan kegiatan *extra effort* untuk mendukung IKU berupa edukasi dan komunikasi layanan KPKNL kepada pengguna serta pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk menyampaikan standar pelayanan sekaligus menjaring masukan perbaikan dari *stakeholder* dan pengguna layanan.

Mitigasi risiko yang telah dilaksanakan untuk mencapai IKU antara lain peningkatan kompetensi pegawai untuk dapat memberikan layanan terbaik, monitoring pengaduan dan masukan dari pengguna layanan serta memastikan tindak lanjutnya telah sesuai.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun mendatang adalah:

- a. Melakukan edukasi dan komunikasi kepada *stakeholder* melalui sosialisasi, komunikasi daring, maupun kunjungan langsung;
- b. Meningkatkan kapasitas dan pengetahuan pegawai melalui berbagai pelatihan;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap layanan secara berkala terhadap layanan APT;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap survei kepuasan pengguna layanan;
- e. Melakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan pengguna layanan;

LAPORAN KINERJA KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

Perbandingan realisasi kinerja KPKNL Lhokseumawe dengan Rencana Strategis DJKN dan Standar Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Target			% Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Standar Nasional	
2025	77 (skala 100)	4,20 (skala 5)	-	120,00%

Target 77 dalam perjanjian kinerja merupakan target tingkat kepuasan dalam skala 100. Realisasi kinerja IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan tersebut telah memenuhi harapan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis DJKN Tahun 2025-2029 (tingkat kepuasan 95,49 dalam skala 100 atau 4,77 dalam skala 5,00).

3.2 Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

1) Deskripsi Kinerja

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi merupakan bentuk pengukuran tingkat keberhasilan *stakeholders* dalam hal memahami substansi/materi yang disampaikan KPKNL melalui audensi dan konsultasi/kunjungan/sosialisasi /*workshop/Focus Group Discussion* atau metode lainnya yang dilaksanakan. Adapun materi yang disampaikan terkait pengelolaan kekayaan negara, lelang, pengurusan piutang negara, serta penilaian.

IKU ini lebih mengutamakan kualitas edukasi dan komunikasi yang dilakukan. Efektitas edukasi dan komunikasi diukur melalui kuisisioner yang memuat 4 indikator yaitu tingkat pemahaman peserta, kualitas materi yang disampaikan, kualitas narasumber, dan kualitas tempat pelaksanaan.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya					
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	PoI/KP

LAPORAN KINERJA KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

Target	74	74	74	74	74	Max/ TLK
Realisasi	100,00	105,00	100,00	99,85	99,85	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena terdapat beberapa tindakan serta alternatif solusi yang dilakukan, antara lain:

- a. Penyusunan rencana kerja edukasi dan komunikasi yang detil sesuai dengan jadwal dan kebutuhan pengguna layanan.
- b. Pelaksanaan edukasi dan komunikasi terkait layanan KPKNL melalui berbagai kesempatan, baik sosialisasi, konsultasi, maupun kunjungan langsung.

Sejalan dengan ketercapaian IKU, telah dilaksanakan kegiatan *extra effort* untuk mendukung IKU berupa penyediaan layanan konsultasi SIMAN V2 untuk satuan kerja serta pelaksanaan sosialisasi layanan secara periodik dengan mengutamakan materi yang relevan dan diperlukan pengguna layanan.

Mitigasi risiko yang telah dilaksanakan untuk mencapai IKU antara lain peningkatan kompetensi pegawai untuk dapat memberikan layanan terbaik, pelaksanaan *in house training* pemberian layanan untuk memastikan keseragaman kualitas layanan yang diberikan.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun mendatang adalah:

- a. Melakukan edukasi dan komunikasi kepada pengguna layanan melalui sosialisasi, konsultasi, maupun kunjungan langsung;
- b. Meningkatkan kompetensi teknis pegawai melalui berbagai pelatihan terkait;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi kualitas layanan secara periodik.

4. SASARAN STRATEGIS: Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Lhokseumawe mengidentifikasi 2 IKU. Uraian mengenai kedua IKU adalah sebagai berikut:

4.1 Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan

- 1) Deskripsi Kinerja

LAPORAN KINERJA KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

Pensertipikatan tanah BMN merupakan bentuk pengamanan aset negara untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan bidang tanah. Kewajiban untuk mensertipikatan Barang Milik Negara berupa tanah, kembali dipertegas oleh Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan: "Seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan". Sebagai tindak lanjutnya telah diterbitkan Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan dan Kepala BPN sebagaimana tertuang dalam PMK Nomor 186/PMK.06/2009 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 24 tahun 2009.

Sesuai arahan Menteri Keuangan untuk menuntaskan program sertifikasi tanah BMN dengan output berupa terbitnya terbitnya Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah RI c.q. K/L, maka sejak TA 2023 seluruh bidang tanah yang belum bersertipikat dimasukkan sebagai objek pensertipikatan dengan mengkategorikan objek target sesuai kondisi masing-masing bidang tanah 4 (empat) kategori yaitu:

- a. Kategori 1 (K1) (*clean & clear*) berupa: (data yuridis dan fisik lengkap dan tidak sengketa/berperkara) dengan output berupa: SHP, update pada SIMAN, dan validasi pada valserah;
- b. Kategori 2 (K2) (*not clean but clear*) berupa: (data yuridis dan fisik tidak lengkap namun tidak sengketa/berperkara) dengan output Peta Bidang Tanah (PBT), dan upload PBT pada SIMAN;
- c. Kategori 3 (K3) (*clean but not clear*) atau (*not clean and not clear*) berupa: data yuridis dan fisik lengkap namun sengketa/berperkara atau data yuridis dan fisik tidak lengkap dan sengketa/berperkara dengan output input pada sentuh tanahku dan atau pemblokiran pada Kantor Desa/kelurahan atau Kantor Pertanahan atau produk lainnya dalam rangka pengamanan BMN;
- d. Kategori 4 (K4) berupa: bidang tanah yang sudah bersertipikat namun belum dilakukan update di Master Aset SIMAN dengan output update data SIMAN dan validasi di Valserah.

LAPORAN KINERJA KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							
	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Po/ K P
Target	5,00%	40,00%	40,00%	60,00%	60,00%	100,00%	100,00%	Max / TLK
Realisasi	5,10%	42,86%	42,86%	101,53%	101,53%	129,59%	129,59%	
Capaian	102,00%	107,15%	107,15%	169,21%	169,21%	129,59%	129,59%	

Capaian IKU Persentase barang Milik Negara berupa Tanah yang disertipikatkan berstatus HIJAU atau telah mencapai target, dengan nilai realisasi akhir tahun mencapai 129,59% atau terealisasi 254 bidang tanah dari target 196 bidang tanah BMN. Bidang tanah yang terealisasi tersebut, yaitu 65 bidang tanah K1, 10 bidang tanah K2, 59 bidang tanah K3, dan 120 bidang tanah K4.

IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena koordinasi intensif dan kerja sama yang terbangun dengan seluruh mitra sertifikasi, juga sangat didukung oleh meningkatnya kesadaran satuan kerja untuk tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum dalam pengamanan tanah BMN. Adapun realisasi yang dicapai dapat optimal karena peningkatan capaian terhadap kategori K3 dan K4 yang telah melebihi target.

Kendala/permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian antara lain terkait kelengkapan dokumen persyaratan permohonan pensertipikatan tanah BMN yang belum dilengkapi oleh satuan kerja, penguasaan bidang tanah oleh pihak lain/pihak ketiga, bidang tanah bersengketa maupun berperkara, serta beberapa kendala penyediaan anggaran pendampingan pada satuan kerja maupun anggaran pelaksanaan pada Kantor Pertanahan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU, telah dilaksanakan kegiatan *extra effort* untuk mendukung IKU berupa:

- a. Melakukan koordinasi dan pendampingan intensif dan selektif dengan satuan kerja target untuk dalam pengajuan permohonan sertifikasi
- b. Koordinasi secara langsung maupun daring dengan satuan kerja target dan

LAPORAN KINERJA KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

Kantor Pertanahan atas penyelesaian bidang tanah bersengketa (K3).

- c. Mendorong Satuan Kerja untuk meningkatkan status progres pensertipikatan melalui surat resmi yang ditembuskan kepada Kanwil maupun kantor pusat.
- d. Penambahan P5 pada kategori K1 dalam rangka menambah potensi capaian bidang diluar target

Mitigasi risiko yang telah dilaksanakan untuk mencapai IKU antara lain koordinasi secara intens dan menjadi jembatan antara satuan kerja target dan Kantor Pertanahan dalam proses pensertipikatan bidang tanah BMN, turut melakukan pendampingan baik kegiatan lapangan maupun tahapan proses pensertipikatan guna meminimalkan risiko dan hambatan pelaksanaan.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun mendatang antara lain menjaga dan meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja, Kantor Pertanahan, kanwil DJKN Aceh dan Direktorat PKKN DJKN, memastikan langkah identifikasi bidang tanah yang menjadi target telah sesuai dengan kategori seharusnya, serta menyusun rencana kerja detil dan langkah-langkah antisipatif untuk memitigasi risiko tidak tercapainya target sertipikasi BMN berupa tanah.

Perbandingan realisasi kinerja KPKNL Lhokseumawe dengan Rencana Strategis DJKN dan Standar Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Target			% Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Standar Nasional	
2025	100%	100%	-	129,59%

Realisasi kinerja IKU persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan telah memenuhi harapan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis DJKN Tahun 2025-2029, dengan persentase capaian 113,79%. Adapun jika dibandingkan dengan realisasi kinerja di level nasional, capaian IKU persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan KPKNL Lhokseumawe menyumbang 0,61% dari total capaian nasional (254 bidang tanah dari total penyelesaian sertipikasi DJKN tahun 2025 sebanyak 41.981 bidang tanah BMN).

4.2 Persentase Evaluasi Kinerja BMN

1) Deskripsi Kinerja

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait *asset performance measurement* melalui sosialisasi, bimbingan teknis, *one-on-one meeting*, visitasi atau sarana komunikatif lainnya.

Perhitungan capaian atas IKU ini terdiri dari 2 komponen, yaitu jumlah NUP BMN yang dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasinya kepada satuan kerja (bobot 50%) dan jumlah NUP BMN yang dilakukan tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi kinerjanya (bobot 50%).

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif					
	Persentase Evaluasi Kinerja BMN					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target (evaluasi)	47	154	231	307	307	Max / TLK
Target (TL rekomendasi)	3	8	12	16	16	
Realisasi (evaluasi)	50	155	232	307	307	
Realisasi (TL rekomendasi)	16	80	80	80	80	
Capaian	68,14%	85,24%	97,79%	110,00%	110,00%	

Capaian IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN berstatus HIJAU atau telah mencapai target, dengan nilai realisasi akhir tahun mencapai 110,00% atau terealisasi 307 NUP BMN yang dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasinya kepada satuan kerja dan 80 NUP BMN yang dilakukan tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi kinerjanya.

LAPORAN KINERJA KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena koordinasi intensif dan kerja sama yang terbangun dengan satuan kerja target evaluasi kinerja BMN. Realisasi yang dicapai dapat optimal karena capaian jumlah NUP komponen B (rekomendasi evaluasi kinerja BMN ditindaklanjuti satuan kerja) tercapai melebihi target yang ditetapkan.

Kendala/permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian antara lain tingkat pemahaman satuan kerja tentang tindak lanjut rekomendasi evaluasi kinerja BMN masih perlu ditingkatkan, serta adanya penyesuaian penggunaan aplikasi SIMAN V2 modul evaluasi kinerja bagi satuan kerja dan KPKNL.

Sejalan dengan ketercapaian IKU, telah dilaksanakan kegiatan *extra effort* untuk mendukung IKU berupa:

- a. Melakukan edukasi dan pendampingan intensif kepada satuan kerja target terkait hasil evaluasi kinerja BMN dan tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan KPKNL.
- b. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan SIMAN V2 modul evaluasi kinerja BMN.

Mitigasi risiko yang telah dilaksanakan untuk mencapai IKU antara lain koordinasi secara intensif dan memonitor tindak lanjut yang dilakukan satuan kerja target atas hasil rekomendasi yang telah disampaikan KPKNL, turut melakukan pendampingan langsung ke lapangan terkait tahapan proses dan penggunaan SIMAN V2 modul evaluasi kinerja BMN.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun mendatang antara lain melakukan identifikasi satuan kerja target evaluasi kinerja BMN dan menyusun rencana kerja detail sesuai *trajectory*, melakukan edukasi dan pendampingan intensif kepada satuan kerja target terkait hasil evaluasi kinerja BMN dan tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan KPKNL, serta melaksanakan bimbingan teknis penggunaan SIMAN V2 modul evaluasi kinerja BMN.

Perbandingan realisasi kinerja KPKNL Lhokseumawe dengan Rencana Strategis DJKN dan Standar Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

LAPORAN KINERJA KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

Tahun	Target			% Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Standar Nasional	
2025	100%	-	-	110,00%

Realisasi kinerja IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN tidak tercantum dalam Rencana Strategis DJKN Tahun 2025-2029. Adapun jika dibandingkan dengan realisasi kinerja di level nasional, capaian IKU Persentase evaluasi kinerja BMN KPKNL Lhokseumawe berada di bawah rata-rata capaian nasional DJKN yang memiliki nilai realisasi 116,67%. Target nasional untuk objek perhitungan evaluasi kinerja BMN adalah 26.702 NUP dan tindak lanjut rekomendasi adalah 1.367 NUP, dan telah diselesaikan 30.258 NUP objek perhitungan dan 6.008 NUP tindak lanjut rekomendasi.

5. SASARAN STRATEGIS: Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Lhokseumawe mengidentifikasi 2 IKU. Uraian mengenai kedua IKU adalah sebagai berikut:

5.1 Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

1) Deskripsi Kinerja

IKU Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara menggambarkan upaya Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jis. PP No. 28 Tahun 2022 jis. PMK 240/PMK.06/2016 jis. PMK No. 52/2024 melakukan pengurusan piutang negara maupun piutang badan/lembaga khusus/badan hukum publik, mulai dari penerimaan BKPN sampai dengan tahap selesai atau optimal. Selain itu, juga menggambarkan K/L /Pemda mengupayakan penyelesaian piutang macet yang tidak dapat diserahkan ke PUPN secara optimal berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020 atau PMK No. 137/PMK.06/2022.

Komponen perhitungan Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara sebagai kriteria capaian IKU berupa :

LAPORAN KINERJA KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

1. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Macet melalui PUPN yang menghasilkan penerimaan Negara (bobot komponen : 1,2), jika output pengurusan berupa pelunasan (penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas/SPPNL); penarikan (penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai/SPPNS); dan koreksi data (berkas piutang macet telah diterbitkan SPPNL/SPPNS di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).
2. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Macet melalui PUPN Tidak Menghasilkan penerimaan Negara (bobot komponen : 1,1) , jika output berupa pengembalian (penerbitan Surat Pengembalian Pengurusan Piutang Negara/SPPPN); pengurusan piutang macet telah optimal (penerbitan Pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Tertagih/PSBDT); dan koreksi data (berkas piutang macet telah diterbitkan SPPPN/PSBDT di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).
3. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Macet yang tidak dapat diserahkan ke PUPN telah optimal (bobot komponen : 1), jika output berupa penerbitan Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO) dan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO); yang terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya serta belum tercatat di aplikasi focusPN.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	7	10	10	11	11	14,4	14,4	Min / TLK
Realisasi	8,8	12,2	12,2	14,4	14,4	14,4	14,4	
Capaian	125,71%	122,00%	122,00%	130,91%	130,91%	122,92%	122,92%	

Target awal penyelesaian BKPN adalah sebanyak 12 BKPN. Dengan *extra effort* yang dilakukan KPKNL sepanjang tahun 2025, target tersebut telah terpenuhi pada Q3 tahun 2025, sehingga dilakukan adendum perubahan target *raw data* menjadi sebanyak 14,4 BKPN. Capaian IKU tersebut berstatus HIJAU atau telah mencapai

LAPORAN KINERJA KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

target, dengan nilai realisasi akhir tahun mencapai 17,7 BKPN yang terdiri dari 1 berkas lunas (nilai 1,2), 8 berkas PSBDT (nilai 1,1), dan 7 berkas pengembalian/SKPPN (nilai 1,1).

IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena terdapat beberapa tindakan serta alternatif solusi yang dilakukan, antara lain:

- a. Koordinasi intensif dengan penyerah piutang serta perangkat pemerintah setempat, sehingga diperoleh informasi yang akurat mengenai kondisi dan kemampuan penanggung utang.
- b. Pendekatan persuasif kepada debitur dan/atau penanggung utang.

Namun, masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu keberadaan debitur dan barang jaminan tidak diketahui, debitur yang sebelumnya rutin membayar angsuran tidak lagi melakukan pembayaran, besaran angsuran tidak sesuai nilai kewajiban sehingga memperpanjang jangka waktu pelunasan, serta debitur atau ahli waris yang berjanji membayar namun tidak merealisasikan pembayaran.

Sejalan dengan ketercapaian IKU, telah dilaksanakan kegiatan *extra effort* untuk mendukung IKU berupa koordinasi intens dengan satuan kerja/lembaga penyerah piutang, penagihan langsung serta penelitian dan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui keberadaan, domisili, dan kemampuan usaha debitur/penanggung utang.

Mitigasi risiko yang telah dilaksanakan untuk mencapai IKU antara lain:

- a. Setiap kegiatan lapangan dilakukan dengan koordinasi dan pendampingan Penyerah Piutang serta instansi setempat guna meminimalkan risiko dan hambatan pelaksanaan.
- b. Mendorong keaktifan pegawai dalam memanfaatkan seluruh potensi Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN), meskipun dalam kondisi keterbatasan data dan ketiadaan barang jaminan.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun mendatang antara lain penagihan aktif, penyelesaian berkas piutang negara, pelaksanaan lelang barang jaminan

LAPORAN KINERJA KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

yang potensial, serta penguatan koordinasi dengan Penyerah Piutang dan perangkat desa.

Perbandingan realisasi kinerja KPKNL Lhokseumawe dengan Rencana Strategis DJKN dan Standar Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Target			% Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Standar Nasional	
2025	100%	100%	-	122,92%

Realisasi kinerja IKU persentase realisasi penyelesaian berkas kasus piutang negara (BKPN) telah memenuhi harapan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis DJKN Tahun 2025-2029, dengan persentase capaian 122,92%. Adapun jika dibandingkan dengan realisasi kinerja di level nasional, capaian IKU persentase realisasi penyelesaian berkas kasus piutang negara (BKPN) KPKNL Lhokseumawe berada di atas rata-rata capaian nasional yang sebesar 120,00%.

5.2 Tingkat Kualitas Layanan Penilaian

1) Deskripsi Kinerja

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup penilaian adalah penilaian BMN berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam. Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk terkait permohonan penilaian. Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon.

Perhitungan kualitas layanan penilaian terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu komponen norma waktu layanan penilaian (40%), komponen akurasi data layanan penilaian (30%), dan komponen nilai hasil kaji ulang (30%).

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	Tingkat kualitas layanan penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Po/ K P

LAPORAN KINERJA KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	Max/ AVG
Realisasi	107,50%	107,56%	107,56%	106,81%	106,81%	106,02%	106,02%	
Capaian	153,57%	153,66%	153,66%	152,58%	152,58%	151,46%	151,46%	

IKU tingkat kualitas layanan penilaian tersebut sudah terlaksana dengan baik tercermin dari capaian di akhir periode yang sudah melampaui target, dan status capaian HIJAU.

Secara umum tidak terdapat kendala dan tantangan yang berarti dalam upaya pencapaian target IKU.

Sejalan dengan ketercapaian IKU, telah dilaksanakan kegiatan *extra effort* untuk mendukung IKU berupa:

1. mengoptimalkan verifikasi dokumen permohonan penilaian, survei lapangan, agar data dan informasi yang diperoleh akurat, terpercaya, dan akuntabel.
2. Melakukan pengendalian kualitas hasil penilaian melalui pelaksanaan kegiatan monitoring konsep laporan/pemaparan konsep laporan, dan evaluasi hasil kaji ulang laporan penilaian oleh Kantor Wilayah.

Mitigasi risiko dan rencana aksi yang akan dilakukan untuk menjaga ketercapaian IKU melalui melaksanakan proses penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan senantiasa menjaga koordinasi yang baik dengan satuan kerja/pengguna layanan.

5.3 Persentase Produktivitas Lelang

1) Deskripsi Kinerja

IKU ini mengukur tingkat produktivitas lelang yang dinilai dari persentase lot lelang laku lelang yang laku per jenis lelang (lelang noneksekusi sukarela, lelang noneksekusi wajib, lelang eksekusi Hak Tanggungan, dan lelang eksekusi selain hak Tanggungan). Adapun tujuannya adalah agar Lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.

LAPORAN KINERJA KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%	Max/ TLK
Realisasi	53,37%	70,20%	70,20%	96,35%	96,35%	133,67%	133,67%	
Capaian	177,90%	175,51%	175,51%	137,65%	137,65%	167,09%	167,09%	

IKU persentase produktivitas lelang sudah terlaksana dengan baik tercermin dari capaian di akhir periode yang sudah melampaui target, dan status capaian HIJAU. Sepanjang tahun 2025, telah dilaksanakan lelang sebanyak 1.841 lot lelang, dengan 402 lot diantaranya merupakan lot lelang laku yang terdiri dari lot lelang noneksekusi wajib BMN, lelang noneksekusi sukarela, serta lelang eksekusi (Hak Tanggungan, Pailit, dan Pengadilan).

IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena terdapat beberapa tindakan serta alternatif solusi yang dilakukan, antara lain:

- a. Monitoring periodik potensi target lot lelang laku.
- b. Koordinasi aktif penggalan potensi lelang, baik berupa BMN, BMD, dan perbankan.

Namun, masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu sebagai berikut terdapat beberapa pembatalan lelang pada tahun 2025 yang berpotensi laku, antara lain disebabkan administrasi persyaratan lelang yang kurang dipenuhi oleh pihak penjual, ketidakhadiran penjual dalam pelaksanaan lelang, serta akibat bencana Hidrometeorologi di Aceh pada akhir tahun 2025.

Mitigasi risiko dan rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun mendatang antara lain menyiapkan rencana kerja lelang sesuai dengan *trajectory* target lelang, penggalan potensi lelang secara aktif, serta meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja, pemerintah daerah, Kejaksaan, serta perbankan.

6. SASARAN STRATEGIS: Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang adaptif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Lhokseumawe mengidentifikasi tiga IKU. Uraian mengenai ketiga IKU tersebut adalah sebagai berikut:

6.1 Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

1) Deskripsi Kinerja

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) meliputi perhitungan terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup Nilai evaluasi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga (SMART) dan Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/Lembaga (IKPA) yang ada pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan regulasi nasional.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Penguatan Keuangan dan BMN yang Akuntabel,serta SDM yang Adaptif							
	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max / TLK
Realisasi	100	100	100	100	100	100	100	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena tindakan serta alternatif solusi yang dilakukan seperti penyusunan rencana penarikan dana secara periodik, permintaan data realisasi output, input RPD pada SAKTI, monitoring penyerapan, serta pengelolaan Uang Pengganti (UP).

Kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu kebijakan efisiensi dari Pemerintah dan menyebabkan pemblokiran belanja modal sehingga pengadaan/pembelian 4 unit Rumah Negara dan tandon air tidak dapat terlaksana.

LAPORAN KINERJA KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

Sejalan dengan ketercapaian IKU, telah dilaksanakan kegiatan *extra effort* untuk mendukung IKU berupa monitoring dan evaluasi periodik terkait kesesuaian rencana penarikan dana dengan realisasi penyerapan, serta koordinasi intensif dengan *stakeholder* eksternal.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun mendatang antara lain penyusunan rencana penarikan dana setiap triwulan, monitoring penyerapan anggaran sesuai *trajectory*, serta melakukan input data capaian output.

Perbandingan realisasi kinerja KPKNL Lhokseumawe dengan Rencana Strategis DJKN dan Standar Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Target			% Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Standar Nasional	
2025	100,00	100	-	120%

Realisasi kinerja IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran telah memenuhi harapan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis DJKN Tahun 2025-2029, dengan persentase capaian 120%. Adapun jika dibandingkan dengan realisasi kinerja di level nasional, capaian IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPKNL Lhokseumawe memiliki nilai lebih tinggi dari rata-rata capaian nasional DJKN yang sebesar 119,47.

6.2 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

1) Deskripsi Kinerja

Dalam Pengadaan Barang/Jasa terdapat 5 (lima) indikator yang diukur yaitu SIRUP, E-Tendering, E-Purchasing Katalog, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing, dan E-Kontrak.

Sebagai salah satu bentuk implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala

LAPORAN KINERJA KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Target nasional untuk P3DN Kementerian Keuangan adalah 95%. Dalam mendukung pencapaian target nasional Kemenkeu diperlukan indikator untuk mengukur kinerja pencapaian P3DN.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Penguatan Keuangan dan BMN yang Akuntabel,serta SDM yang Adaptif							
	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max / TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena tindakan serta alternatif solusi yang dilakukan seperti konsistensi dalam perencanaan pengadaan melalui penyusunan dan pengumuman paket pengadaan secara tepat waktu dan akurat pada aplikasi SIRUP, kepatuhan terhadap regulasi pengadaan barang/jasa, optimalisasi pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik (E-Purchasing), peningkatan pemahaman dan kompetensi SDM pengelola pengadaan, dan komitmen pimpinan dan unit kerja dalam mendukung pencapaian target P3DN.

Kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu:

1. Tidak tersedianya produk dalam negeri yang sesuai kebutuhan, baik akibat keterbatasan volume produksi maupun keterbatasan teknologi yang belum memenuhi spesifikasi barang/jasa yang diperlukan.
2. Adanya kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan beberapa belanja/pengadaan perlu tidak terealisasi sesuai rencana dan memerlukan penyesuaian.

Sejalan dengan ketercapaian IKU, telah dilaksanakan kegiatan *extra effort* untuk mendukung IKU berupa penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) secara komprehensif dan tepat waktu, pelaksanaan pengadaan sesuai paket yang telah ditetapkan dalam aplikasi SIUKPBJ, dan pelaporan bukti belanja secara tertib dan tepat waktu melalui aplikasi INAPROC.

LAPORAN KINERJA KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tata kelola pengadaan barang dan jasa, rencana aksi yang akan dilakukan ke depan meliputi peningkatan kualitas perencanaan pengadaan berbasis kebutuhan dan data, optimalisasi pemanfaatan E-Purchasing dan produk dalam negeri untuk mendukung target P3DN, dan penguatan integrasi dan kepatuhan pelaporan melalui aplikasi SIUKPBJ dan INAPROC.

6.3 Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

1) Deskripsi Kinerja

IKU ini mengukur dua komponen, yaitu Kualitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kebintalan dan Kualitas Pemenuhan Standard JP bagi Pegawai (selain pimpinan unit). Program Kebintalan bertujuan mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

Kualitas Pemenuhan Standard JP (Jam Pelatihan) bagi pegawai mengukur persentase banyaknya pegawai (selain pimpinan unit) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Kriteria pemenuhan pengembangan kompetensi adalah minimal 40 JP dalam setahun.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Penguatan Keuangan dan BMN yang Akuntabel,serta SDM yang Adaptif							
	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	PoI/ K P
Target	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%	Max / TLK
Realisasi	60,18%	74,00%	74,00%	86,00%	86,00%	98,00%	98,00%	
Capaian	300,91%	185,00%	185,00%	143,33%	143,33%	122,50%	122,50%	

LAPORAN KINERJA KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai pada KPKNL Lhokseumawe tahun 2025 terealisasi 122,50% dari target sebesar 80% atau status capaian kinerja HIJAU.

Target kinerja dapat tercapai melampaui apa yang ditargetkan berkat upaya yang dilaksanakan antara lain:

- a. Mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat dan *e-learning* yang sesuai dengan tupoksi pada seksi/ unitnya masing-masing
- b. Senantiasa memberikan himbauan untuk pelaksanaan diklat dan *e-learning* secara rutin setiap bulan.
- c. Membuat data monitoring pemenuhan jamlat masing-masing pegawai mengadakan kegiatan Kamis Informatif dan Keta Marbagi yaitu kegiatan saling berbagi informasi antar pegawai dengan tujuan sharing knowledge terhadap informasi dan ilmu yang didapatkan baik setelah mengikuti pelatihan ataupun informasi lainnya.

Pemanggilan diklat atau *e-learning* dari kantor pusat sudah cukup memadai bagi sebagian pegawai sehingga seluruh pegawai telah memenuhi jam pelatihan yang ditargetkan. Namun demikian, seluruh pegawai tetap diimbau untuk mengikuti *e-learning* mandiri yang berkaitan dengan tugas fungsi masing-masing dan menginformasikan jumlah pemenuhan jam pelatihan kepada Subbagian Umum.

Tentunya KPKNL Lhokseumawe telah membuat perencanaan aksi ke depan agar pengembangan kompetensi pegawai dapat lebih maksimal, di antaranya dengan menginformasikan pengajuan diklat setiap bulannya pada Aplikasi Diklat, memonitor setiap panggilan diklat dan meastikan terpenuhinya jamlat seluruh pegawai, serta aktif memberikan informasi mengenai kegiatan pengembangan *soft competency* seperti *e-Learning (Open Access)*.

Perbandingan realisasi kinerja KPKNL Lhokseumawe dengan Rencana Strategis DJKN dan Standar Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

LAPORAN KINERJA KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

Tahun	Target			% Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Standar Nasional	
2025	100%	-	-	122,50%

IKU persentase pengembangan kompetensi pegawai tidak terdapat dalam target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis DJKN Tahun 2025-2029. Adapun jika dibandingkan dengan realisasi kinerja di level nasional, capaian IKU persentase pengembangan kompetensi pegawai KPKNL Lhokseumawe berada di atas rata-rata capaian nasional DJKN, dengan realisasi 122,50% dan realisasi nasional DJKN 120,00%.

7. SASARAN STRATEGIS: Penanganan Hukum dan Komunikasi yang Efektif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Lhokseumawe mengidentifikasi 2 (dua) IKU. Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagai berikut.

7.1 Indeks Penanganan Permasalahan Hukum

1) Deskripsi Kinerja

Indeks penanganan permasalahan hukum merupakan IKU yang mengukur ketepatan penanganan permasalahan hukum yang dihadapi terkait tugas dan fungsi KPKNL, baik litigasi maupun non litigasi. Indeks ini terdiri dari 2 (dua) komponen pengukuran, yaitu (1) indeks penanganan permasalahan hukum di pengadilan (bobot 80%), dan (2) indeks putusan perkara berkekuatan hukum tetap (bobot 20%).

Pengukuran indeks penanganan permasalahan hukum dimulai pada saat Relas Gugatan/Panggilan Sidang diterima oleh KPKNL, kemudian sesuai dengan tahapan penanganan hingga permasalahan hukum/perkara dimaksud dinyatakan selesai/berkekuatan hukum tetap.

Pengukuran indeks putusan perkara berkekuatan hukum tetap mengacu pada putusan yang *inkracht van gewijsde*, artinya terhadap keputusan itu tidak lagi terbuka jalan hukum pada hakim lain atau hakim itu juga untuk mengubah keputusan tersebut.

LAPORAN KINERJA KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Penanganan Hukum dan Komunikasi yang Efektif							
	Indeks Penanganan Permasalahan Hukum							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Po/ K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max /TLK
Realisasi	115,29	120,11	120,11	117,65	117,65	119,22	119,22	
Capaian	115,29%	120,11%	120,11%	117,65%	117,65%	119,22%	119,22%	

Indeks Penanganan Permasalahan Hukum pada KPKNL Lhokseumawe tahun 2025 terealisasi 119,22% dari target sebesar 100%, dengan status capaian kinerja HIJAU. Sepanjang tahun 2025, telah dilakukan penanganan atas 18 perkara perdata, dengan rincian 6 perkara tingkat pertama, 2 perkara tingkat banding, dan 10 perkara tingkat kasasi.

IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena tindakan serta alternatif solusi yang dilakukan, antara lain sebagai berikut:

- a. koordinasi aktif dengan Kanwil DJKN Aceh, Direktorat Hukum dan Humas, serta Biro Advokasi terkait penerbitan Surat Kuasa penanganan perkara di pengadilan.
- b. Monitoring posisi perkara secara rutin baik melalui *e-court* maupun SIPPN masing-masing pengadilan/mahkamah syar'iyah.

Sejalan dengan ketercapaian IKU, telah dilaksanakan kegiatan *extra effort* untuk mendukung IKU berupa peningkatan kompetensi pegawai penanganan perkara melalui diklat/pelatihan dan monitoring rutin posisi perkara melalui *e-court* maupun SIPPN.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja penanganan permasalahan hukum, rencana aksi yang akan dilakukan ke depan meliputi peningkatan kompetensi pegawai penanganan perkara, koordinasi aktif dengan Biro Advokasi dan Kanwil DJKN Aceh terkait proses jawab-jinawab di persidangan, serta menjaga komunikasi dengan lembaga peradilan (pengadilan negeri dan mahkamah syar'iyah).

7.2 Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

1) Deskripsi Kinerja

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. KPKNL Lhokseumawe selaku pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Tingkat III berkewajiban untuk menyampaikan informasi publik, melaporkan pengelolaan layanan informasi publik, dan menunjuk petugas pengelola layanan informasi publik.

IKU ini hadir untuk mengukur realisasi penyediaan dan pemutakhiran informasi publik yang terdiri dari tiga komponen yaitu :

1. Ketepatan waktu penyampaian informasi publik atas permintaan informasi publik dari pengguna layanan.
2. Ketepatan waktu penyampaian laporan informasi publik.
3. Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Publik pada *Website* KPKNL Lhokseumawe (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lhokseumawe>).

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Penanganan Hukum dan Komunikasi yang Efektif							
	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Po/ K P
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max / TLK
Realisasi	110	110	110	110	110	112,50	112,50	
Capaian	137,50%	137,50%	137,50%	137,50%	137,50%	140,62%	140,62%	

Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) pada KPKNL Lhokseumawe tahun 2025 melebihi target, dengan status capaian kinerja HIJAU.

IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena tindakan serta alternatif solusi yang dilakukan berupa memonitor permohonan informasi publik dari pemohon informasi, serta menyediakan, mengelola, dan mengumumkan informasi Publik dengan akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

8. SASARAN STRATEGIS: Pengawasan dan Pengendalian internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Lhokseumawe mengidentifikasi satu IKU. Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut.

8.1 Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

1) Deskripsi Kinerja

IKU ini memiliki 2 (dua) komponen penilaian utama, yaitu review berkelanjutan atas kualitas pengelolaan kinerja organisasi dan kinerja pegawai, serta review atas kualitas implementasi manajemen risiko. Penilaian atas kedua komponen ini bertujuan untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan memuat pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja, baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai. Reviu atas kualitas pengelolaan kinerja bertujuan untuk memastikan seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja diimplementasikan dengan efektif. Proses reviu dilakukan melalui *self assessment* (penilaian mandiri), adapun penetapan hasil penilaian tingkat unit eselon III (KPKNL) dilakukan penilaian oleh Manajer Kinerja tingkat Eselon II (Kanwil DJKN).

Reviu atas kualitas manajemen risiko dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko serta didukung dengan edukasi manajemen risiko yang efektif. Indeks Kualitas Manajemen Risiko dilihat dari tiga aspek, yaitu kelengkapan piagam dan formulir risiko, kesesuaian isi formulir, kepatuhan penyampaian, kesesuaian format dan dokumen pendukung.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif					
	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Pol/ K P

LAPORAN KINERJA KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

Target	80	80	80	80	80	Max /TLK
Realisasi	99,55	97,44	95,57	95,11	95,11	
Capaian	124,44%	121,80%	119,46%	118,89%	118,89%	

**terdapat perubahan manual IKU dibandingkan tahun 2024*

Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko tahun 2025 tercapai sebesar 95,11 dari target sebesar 80, dengan demikian status capaian kinerja HIJAU. IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena tindakan serta alternatif solusi yang dilakukan, antara lain sebagai berikut:

- a. Perencanaan kinerja yang melibatkan seluruh pegawai selaku pemilik target kinerja;
- b. Identifikasi risiko yang dituangkan dalam Piagam Risiko dan pemetaan langkah penanganan risiko;
- c. Monitoring dan evaluasi kinerja dan risiko secara periodik;
- d. Memonitor tindak lanjut rencana aksi hasil monev kinerja dan risiko.

Sejalan dengan ketercapaian IKU, telah dilaksanakan kegiatan *extra effort* untuk mendukung IKU berupa pembentukan tim kerja (*squad team*) manajemen kinerja dan organisasi.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja dan risiko, rencana aksi yang akan dilakukan ke depan meliputi peningkatan kapabilitas pegawai pengelola kinerja dan risiko, peningkatan *awareness* pegawai terkait kinerja dan risiko melalui sosialisasi dan edukasi terkait pengelolaan kinerja dan risiko.

LAPORAN KINERJA KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 dapat dilihat berdasarkan data pada tabel berikut:

Tabel 3
Perbandingan Persentase Capaian Kinerja periode 2024 dan 2025

No	IKU	Persentase Capaian			Keterangan
		2024	2025	% Kenaikan/ (Penurunan)	
1	Indeks Integritas	103,67%	105,32%	1,65%	-
2	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	97,84%	120,00%	22,16%	-
3	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara		102,01%	N/A	IKU baru tahun 2025
4	Persentase realisasi pokok lelang	46,79%	108,96%	62,17%	Raw data target tahun 2024 > 2025 (karena didasarkan pada capaian tahun 2023). Secara nominal, capaian tahun 2025 > dari tahun 2024
5	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	120,00%	120,00%	-	Nilai maksimal
6	Indeks kepuasan pengguna layanan		120,00%		IKU baru tahun 2025
7	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi		120,00%		IKU baru tahun 2025
8	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	113,79%	120,00%	6,21%	-
9	Persentase evaluasi kinerja BMN	120,00%	110,00%	(10,00)%	Perbedaan manual IKU & perhitungan
10	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	113,72%	120,00%	6,28%	-
11	Tingkat kualitas layanan penilaian	120,00%	120,00%	-	Nilai maksimal
12	Persentase produktivitas lelang	120,00%	120,00%	-	Nilai maksimal
13	Indeks kualitas kinerja anggaran	120,00%	120,00%	-	Nilai maksimal
14	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa		120,00%		IKU baru tahun 2025
15	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	120,00%	120,00%	-	Nilai maksimal
16	Indeks penanganan permasalahan hukum		119,22%		IKU baru tahun 2025
17	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	120,00%	120,00%	-	Nilai maksimal
18	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	111,54%	118,89%	7,35%	-
NKO		109,42%	115,98%		

3.2 Realisasi Anggaran dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk pembiayaan kegiatan KPKNL Lhokseumawe tahun 2025, telah dialokasikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025. Dari keseluruhan anggaran yang tersedia dengan pagu Rp2.318.222.000,00 setelah revisi dan penghematan (kebijakan efisiensi dan *self blocking*) yang dilakukan sepanjang tahun 2025, direalisasikan penyerapan anggaran atas pagu tersebut sebesar Rp2.138.520.876,00 atau mencapai 92,25%. Apabila mengacu pada Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang dicapai adalah 98,02%.

Sumber data realisasi tersebut diambil dari aplikasi Sistem Aplikasi SAKTI dan OM-SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara.

Realisasi Anggaran KPKNL Lhokseumawe TA 2025

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Belanja Barang	2.218.384.000	2.039.821.886	91,95%
Belanja Modal	99.838.000	98.698.990	98,86%
Belanja Pegawai	0	0	0%
Total	2.318.222.000	2.138.520.876	92,25%

Adapun rincian realisasi penyerapan anggaran tahun 2025 serta hubungannya dengan efisiensi yang penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	Keterangan
Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN, PN, Lelang)	51.414.000,00	6.470.000,00	12,58%	Target 129 orang Realisasi 675 orang
Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	29.824.000,00	17.322.510,00	58,09%	Target 307 rekomendasi kebijakan

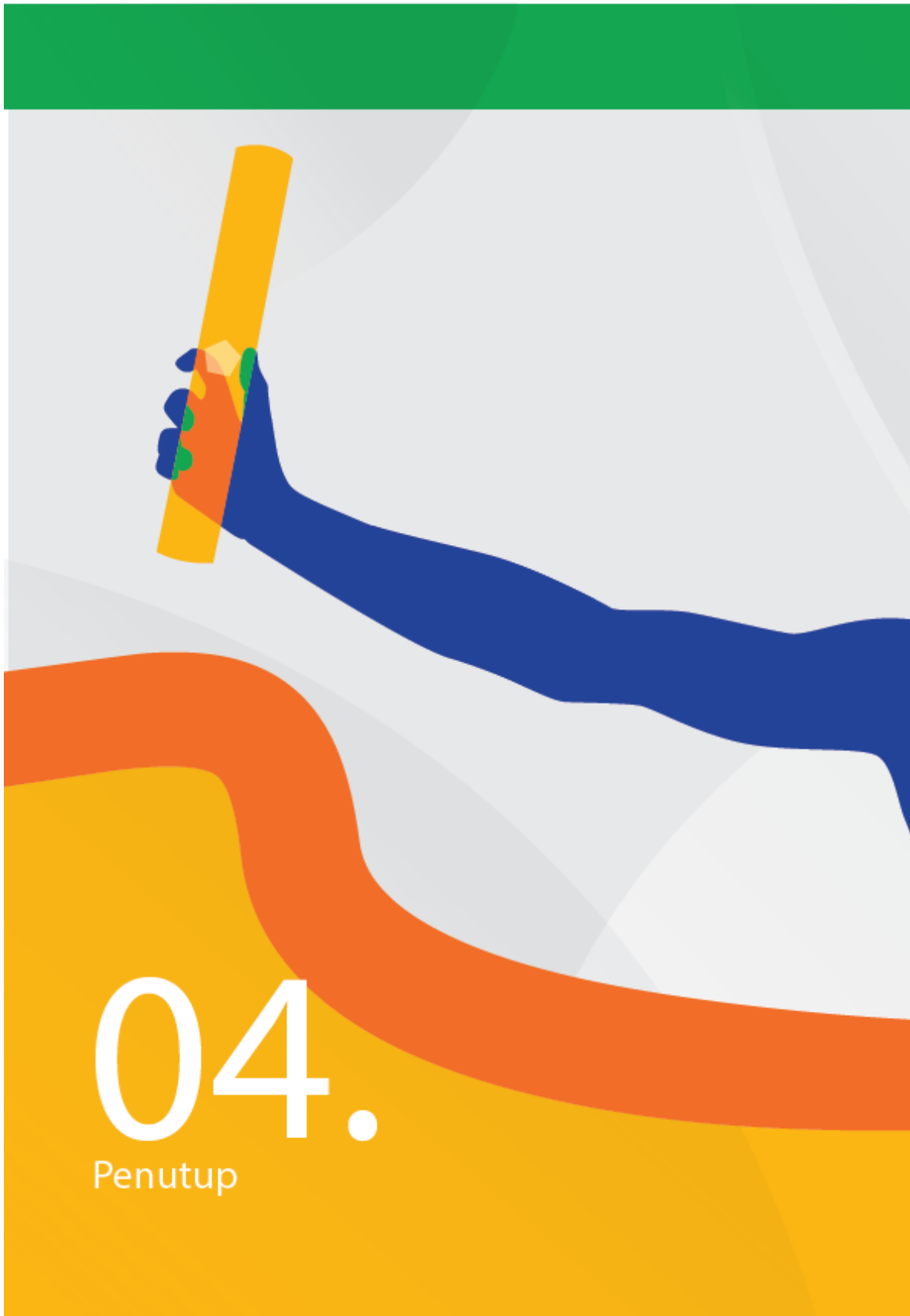
LAPORAN KINERJA KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	Keterangan
				Realisasi 307 rekomendasi kebijakan
Rekomendasi Bidang Kekayaan Negara	12.840.000,00	12.176.146,00	94,80%	Target 3 rekomendasi Realisasi 7 rekomendasi
Aset BUN yang Dikelola	271.522.000,00	183.886.186,00	67,70%	Target 48 aset Realisasi 49 aset
Rekomendasi BMN berupa Tanah yang Disertipikatkan	9.519.000,00	4.599.000,00	48,30%	Target 148 rekomendasi Realisasi 254 rekomendasi
Rekomendasi Hasil Penilaian	15.680.000,00	11.694.000,00	74,60%	Target 2 rekomendasi Realisasi 5 rekomendasi
Risalah Lelang	17.496.000,00	17.477.497,00	99,90%	Target 260 dokumen Realisasi 268 dokumen
Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN,PN)	187.848.000,00	158.136.750,00	84,18%	Target 120 surat keputusan Realisasi 340 surat keputusan
Layanan Bantuan Hukum	28.000.000,00	25.571.315,00	91,32%	Target 12 layanan Realisasi 34 layanan
Layanan Dukungan Manajemen Internal (Perkantoran, kerumahtanggaan)	1.799.819.000,00	1.565.864.800,00	87,00%	Target 24 layanan Realisasi 24 layanan
Layanan Dukungan Manajemen Internal (Peralatan fasilitas, kendaraan bermotor)	297.984.000,00	98.698.990,00	33,12%	Target 33 unit Realisasi 33 unit

LAPORAN KINERJA KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	Keterangan
Kehumasan	22.968.000,00	9.832.058,00	42,80%	Target 12 kegiatan Realisasi 21 kegiatan

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa target kinerja/output TA 2025 pada setiap kegiatan telah dicapai dengan menggunakan sumber daya yang efisien. Anggaran telah digunakan dengan tepat sasaran, efektif dan efisien, tentunya dengan memastikan tujuan kegiatan dan target kinerja telah tercapai dengan baik.



04.

Penutup

BAB IV

Penutup

Kementerian Keuangan telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja *berbasis Balanced Scorecard* (BSC) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, KPKNL Lhokseumawe sebagai salah satu unsur Kementerian Keuangan telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) tersebut untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis. Berdasarkan hal tersebut, pengelolaan kinerja pada KPKNL Lhokseumawe diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis pada tahun 2025.

Capaian Kinerja Organisasi KPKNL Lhokseumawe pada tahun 2025 secara umum hampir memenuhi seluruh target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut tercermin dari kemampuan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan dengan NKO mencapai 115,98%. Jumlah IKU pada tahun 2025 sebanyak 18 IKU, seluruh IKU telah mencapai status capaian HIJAU.

Adanya berbagai hambatan dan permasalahan merupakan pembelajaran yang berharga untuk perbaikan kinerja tahun yang akan datang. Berbagai hambatan baik internal maupun eksternal diharapkan dapat diatasi untuk meningkatkan kapabilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Akhirnya, Laporan Kinerja Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Lhokseumawe. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja KPKNL Lhokseumawe, serta sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan ke depan.



DJKN

KPKNL
LHOKSEUMAWE



Layanan Informasi



0852 5996 7220



0645-631600



@kpknl_lhokseumawe



@KPKNL_Lhoksm



www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lhokseumawe

Layanan Pengaduan



0821 6481 4600



Wise kemenkeu :
wise.kemenkeu.go.id



SP4N LAPOR :
www.lapor.go.id



Halo DJKN 150 991

Dukung kami ...

Dalam mewujudkan pembangunan
Zona Integritas menuju Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani
(ZI-WBBM)



Melayani Amanah Tanggap
Akuntabel Bermartabat Bersih
Jujur Terpercaya

"Mantab Berjaya"



LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA

KPKNL LHOKSEUMAWE

TAHUN 2025



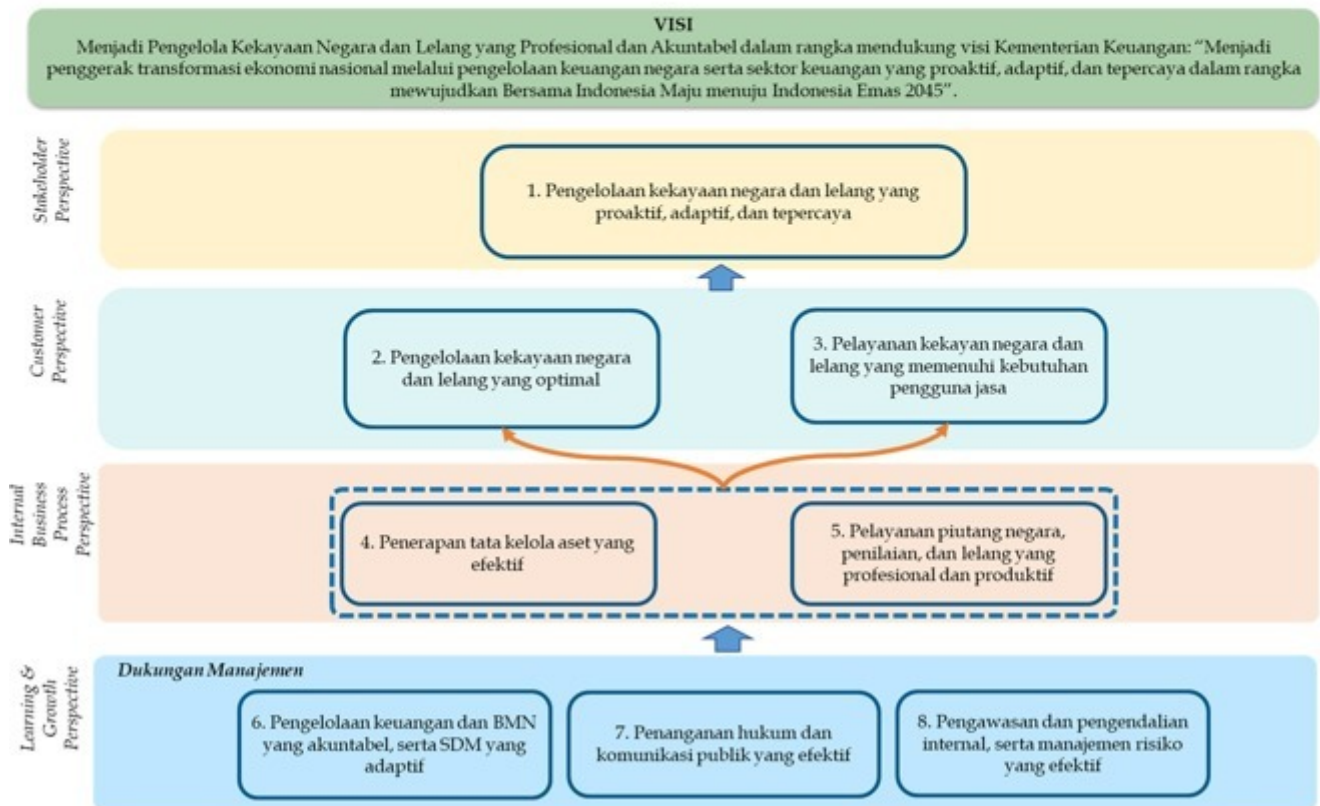
PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-2/WKN.1/2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
LHOKSEUMAWE
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
LHOKSEUMAWE
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	1a-CP	Indeks integritas	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp11,3 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP	Persentase realisasi Pokok lelang	100% (Rp50 M)
		2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp100 Jt)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77
		3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80

Program/Kegiatan 2025

Program:

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko

Kegiatan

Anggaran

Rp456,148,000



1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp44,631,000
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp0
3. Pengelolaan Aset	Rp411,517,000
4. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	Rp0
Program:	
Dukungan Manajemen	Rp4,415,331,000
Kegiatan	
1. Legislasi dan Litigasi	Rp15,404,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp4,367,501,000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp15,937,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp16,489,000

Kota Lhokseumawe, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Aceh



Ditandatangani Secara Elektronik
Nofiansyah

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Lhokseumawe



Ditandatangani Secara Elektronik
Novrizal



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
LHOKSEUMAWE
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp11,3 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi Pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp50 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp100 Jt)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80

Kota Lhokseumawe, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe



Ditandatangani Secara Elektronik
Novrizal



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Kota Lhokseumawe, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe



Ditandatangani Secara Elektronik
Novrizal



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Novrizal		NAMA	Nofiansyah
NIP	19751130 199602 1 002		NIP	19741111 199403 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	Indeks integritas	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp11,3 M)	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi Pokok lelang	100% (Rp50 M)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp100 Jt)	Penerima Layanan
3	Pelayanan kekayan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	Penerima Layanan
		Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan
4	Penerapan tata kelola aset yang	Persentase Barang Milik Negara berupa	100%	Proses Bisnis

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



	efektif	tanah yang disertipikatkan		
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat	Ekspektasi Khusus Pimpinan:



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p>



PERILAKU KERJA		
	<p>sah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Kota Lhokseumawe, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Nofiansyah
19741111 199403 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Novrizal
19751130 199602 1 002

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	23 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp11,3 M)
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi Pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp50 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp100 Jt)
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74



4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80

KONSEKUENSI

Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.



Kota Lhokseumawe, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Nofiansyah

19741111 199403 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Novrizal

19751130 199602 1 002

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025

